

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Anas *et al.* (2015) meneliti tentang analisis pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Manado Media Grafika, hasil penelitian menjelaskan pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas dan prosedur akuntansi untuk PT Manado Media Grafika pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dengan adanya pembagian tugas pada masing-masing bagian, dalam penerimaan maupun pengeluaran kas telah menggunakan prosedur-prosedur yang dibuat sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya unsur sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan ini dapat meningkatkan kinerja manajerial, sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain.

Harijanto *et al* (2016) meneliti tentang analisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Hasjrat Abadi Manado, hasil penelitian menjelaskan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Hasjrat Abadi Manado dilaksanakan secara sistematis, semua proses penerimaan dan pengeluaran kas harus mendapat otoritas dari pihak yang berwenang. Karena sudah ada pemisahan fungsi akuntansi, keuangan dan kas yang telah didukung dengan sistem komputasi untuk mencatat semua transaksi.

Devi Fauziah (2016) meneliti tentang evaluasi sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam upaya peningkatan pengendalian internal pada PG Kebon Agung Malang, hasil penelitian menjelaskan sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas belum sesuai standart, karena dalam struktur organisasi logistik melakukan fungsi perangkapan tugas yaitu melakukan penagihan kepada petani sebetulnya tugas tersebut dilakukan oleh fungsi penagihan. Dengan kurang sempurnanya fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan maupun catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan tersebut maka prosedur penerimaan maupun pengeluaran kasnya harus dilakukan perbaikan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Pengertian sistem dan prosedur menurut Cole dalam Baridwan (2002:3) “Sistem adalah suatu dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”.

Adapun menurut Mulyadi (2001:5) pengertian sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat sesuai dengan pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur yaitu merupakan urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

2. Kualitas Sistem dan Prosedur

Menurut Jogiyanto (2005:10) menjelaskan kualitas sistem dan prosedur dari suatu informasi (*quality of information*) tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat (*accurate*), tepat pada waktunya (*timeliness*) dan relevan (*relevance*) yang menggambarkan kualitas dari informasi dengan bentuk bangunan yang ditunjang oleh tiga buah pilar.

Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak biasa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.

Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk

orgaisasi. Dewasa ini mahal nya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.

Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab-musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Sebaliknya informasi mengenai harga pokok produksi untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang relevan, tetapi relevan untuk akuntan.

3. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dapat mempunyai beberapa pengertian, menurut Baridwan (2002:7): “Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan semua cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisensi didalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan lebih dahulu”.

Adapun pengertian sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2001: 127) yaitu sebagai berikut: Sistem pengendalian internal merupakan suatu bentuk dari struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, pengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, mendorong efesensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, dan mengolah informasinya secara manual dan komputer.

Perusahaan apabila tidak menekankan hal tersebut di atas, maka keuntungan perusahaan yang diperoleh akan turun bahkan kemungkinan bisa mengakibatkan kerugian. Seorang pemilik perusahaan kecil masih dapat secara langsung mengendalikan kegiatan operasional perusahaan, dengan demikian para pegawainya sulit melakukan penyelewengan atau penyimpangan lainnya. Sesuai dengan kenyataan perusahaan yang makin berkembang maka

pengendalian secara langsung tidak dapat dilakukan lagi, keadaan semacam ini memaksa pimpinan perusahaan untuk melimpahkan wewenangnya. Bagi pimpinan, meskipun pelimpahan wewenang ini diadakan tetapi tanggung jawab tetap berada ditangannya. Keadaan tersebut yang dapat membuktikan bahwa suatu sistem pengendalian internal yang dapat mengamankan harta perusahaan yang memberi keyakinan kepadanya bahwa apa yang dapat dilaporkan oleh bawahannya memang benar, hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi usaha serta dapat pula secara terus menerus bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan.

4. Kebutuhan akan Pengendalian

Menurut Bodnar & Hopwood (2000:168) menyebutkan bahwa: Pengendalian dibutuhkan untuk mengurangi bentuk penyimpangan-penyimpangan. Organisasi tergantung pada beragam eksposur yang menimbulkan efek yang buruk bagi operasi atau bahkan timbul terus menerus. Eksposur terdiri dari dampak keuangan potensial yang berlipat ganda karena probabilitas kemunculannya. Istilah ‘resiko’ sinonim dengan ‘probabilitas kemunculan’. Jadi, eksposur adalah resiko yang dikalikan dengan konsekuensi keuangannya.

Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti banjir atau pencurian bukanlah penyimpangan. Penyimpangan organisasi untuk jenis kejadian ini adalah kerugian keuangan potensial organisasi dikalikan dengan probabilitas kemunculan kejadian ini. Penyimpangan tidak timbul dari kurangnya pengendalian. Pengendalian cenderung untuk mengurangi penyimpangan, tetapi kurangnya pengendalian jarang menyebabkan penyimpangan. Penyimpangan melekat dalam operasi setiap organisasi dan dapat timbul karena berbagai sebab.

Sebab-sebab timbulnya penyimpangan tersebut antara lain meliputi (Bodnar dan Hopwood, 2000):

1. Biaya Berlebihan

Biaya yang berlebihan akan mengurangi pendapatan. Pengeluaran perusahaan mempunyai potensi akan lebih dari sesungguhnya. Pembayaran

untuk barang yang dibeli untuk kepentingan perusahaan mempunyai potensi semacam itu. Cek pembayaran distribusi kepada pekerjaan yang tidak efektif, tidak efisien, atau keduanya, produksi tidak efisien, disebabkan penggunaan bahan dan tenaga secara berlebihan. Pembelian aset secara berlebihan juga dapat terjadi. Beban berlebihan untuk iklan dan beban perjalanan bisa terjadi. Tagihan atau pajak mungkin terlambat dibayarkan, menyebabkan harus dilakukan pembayaran denda dan beban bunga yang berkaitan.

2. Pendapatan Menurun

Pendapatan menurun akan mengurangi laba. Piutang tak tertagih dalam penjualan kredit bisa melebihi yang seharusnya. Penjualan yang dikirimkan pada pelanggan tidak dicatat, sehingga tidak ditagih pelanggan ditagih secara tidak benar dengan jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya. Tagihan dapat dihilangkan atau diikhtisarkan secara tidak benar sebagai piutang dagang. Penjualan diretur atau pengiriman barang yang diorder tidak benar. Potongan penjualan berlebihan timbul dengan alasan-alasan yang sama.

3. Kehilangan Aktiva

Aset dapat hilang karena pencurian, penipuan, atau kerusakan alamiah. Perusahaan harus menangani aktiva, yang memiliki potensi hilang. Aset dapat dihilangkan secara tidak diinginkan. Kas, persediaan, atau peralatan secara tidak disengaja dihilangkan atau dirusak oleh karyawan yang ceroboh atau bahkan oleh karyawan yang tidak hati-hati. Kas, persediaan, atau peralatan juga dapat dihilangkan atau dirusak secara sengaja oleh karyawan, termasuk juga manajemen.

4. Akuntansi yang Tidak Akurat

Kebijakan dan prosedur-prosedur akuntansi dapat mengandung kesalahan, tidak tepat, atau sangat berbeda dari harapan. Kesalahan-kesalahan dapat mencakup penilaian, penetapan waktu, atau klasifikasi transaksi. Kesalahan pencatatan dapat bersifat disengaja atau tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan berdampak pada informasi yang tidak akurat bagi kepentingan

manajemen dan menimbulkan kesalahan yang material pada laporan keuangan.

5. Interupsi Bisnis

Interupsi bisnis dapat terdiri dari kejadian-kejadian pada saat operasi atau di akhir operasi suatu organisasi. Interupsi bisnis dapat ditimbulkan oleh karena eksposur berlebihan, tindakan kekerasan fisik, atau kerusakan alamiah.

6. Sanksi wajib

Sanksi wajib mencakup setiap hukuman yang timbul dari otoritas hukum atau peraturan yang memiliki yurisdiksi atas perusahaan dan operasinya. Organisasi harus meyakini bahwa aktivitasnya sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan. Interupsi atas operasi bisnis yang normal dapat terjadi karena sanksi yang dikenakan oleh yang berwajib pada saat perusahaan diketahui telah melakukan tindak kriminal.

7. Kerugian Kompetitif

Kerugian kompetitif adalah ketidakmampuan organisasi untuk tetap bertahan di dalam pasar. Kerugian kompetitif dapat timbul dari kombinasi dari eksposur-eksposur di atas, dan juga dapat timbul dari keputusan manajemen yang tidak efektif.

8. Penipuan dan Penggelapan

Penipuan dan penggelapan dapat dilakukan oleh orang di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Biaya yang berlebihan, pendapatan yang menurun, dan kerugian aset dapat merupakan hasil dari penipuan dan kecerobohan.

5. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2001:128) yaitu: Unsur-unsur sistem pengendalian internal seperti pemisahan tanggung jawab dan fungsional secara tegas sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang dan pendapatan, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi, karyawan yang kompeten dan tanggung jawab.

Sedangkan menurut Baridwan (2002:7) :“Suatu sistem pengendalian internal harus meliputi struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, berguna untuk harta, hutang pendapatan, praktek yang sehat dan tegas serta fungsi setiap bagi dari organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya”.

Adapun menurut Bodnar & Hopwood (2000): Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai. Sistem pengendalian internal perusahaan terdiri dari tiga elemen, yaitu: lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur-prosedur pengendalian. Konsep struktur pengendalian internal didasarkan pada dua premis utama. Premis ini adalah tanggung jawab manajemen dan jaminan yang memadai.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diuraikan elemen sistem pengendalian internal, yaitu meliputi:

1. Pemisahan tanggung jawab dan wewenang yang tegas

Merupakan kerangka pembagian tugas atau tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi (karyawan) yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Contohnya yaitu meliputi: pemisahan tanggung jawab karyawan, alur pemberian tugas karyawan yang jelas dan pemisahan fungsi operasional dan fungsi lain dari perusahaan.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

Merupakan suatu kegiatan perusahaan yang memungkinkan setiap transaksi yang terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi tersebut. Contoh adanya pemisahan bagian-bagian terkait untuk mengotorisasi setiap transaksi dan penggunaan formulir yang dapat memberikan informasi sebagai media pemberian otorisasi.

3. Praktik yang sehat

Merupakan suatu bentuk tanggung jawab dimana setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan oleh satu orang atau satu unit organisasi. Contohnya yaitu setiap transaksi dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi dan penggunaan formulir yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Karyawan yang kompeten dan jujur

Merupakan karyawan yang mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaannya secara efektif dan efisien. Contohnya yaitu ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan penyimpangan atas pekerjaan yang dilakukan.

Manajemen sendiri bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal. Meskipun tanggung jawab tertentu dapat didelegasikan kepada bawahan, tanggung jawab akhir tetaplah pada manajemen. Meskipun *auditor internal*, *auditor eksternal*, dan pihak-pihak lain secara langsung memperhatikan sistem pengendalian internal perusahaan, tanggungjawab utama sistem ini tetaplah pada manajemen.

Konsep jaminan yang memadai harus dikaitkan dengan manfaat dan biaya pengendalian. Manajemen yang hati-hati tidak akan menghabiskan biaya untuk manfaat pengendalian yang lebih kecil dari biayanya. Cukup sering pertimbangan manajemen mengenai manfaat dan biaya pengendalian relatif, bersifat subyektif secara alamiah. Seringkali sulit untuk mengukur manfaat dan biaya jika faktor-faktor seperti reputasi perusahaan atau dampak moral pengendalian terhadap karyawan merupakan pertimbangan utama. Manajemen harus menguji pertimbangan untuk memperoleh jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendaliannya dapat dipenuhi.

Sistem pengendalian internal perusahaan menurut Bodnar & Hopwood (2000 : 174) “ Terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai”. Sistem pengendalian internal perusahaan terdiri dari tiga elemen, yaitu : lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur-prosedur pengendalian. Konsep struktur pengendalian internal didasarkan pada dua premis utama. Premis ini adalah tanggung jawab manajemen dan jaminan yang memadai.

Tanggung jawab manajemen, manajemen sendiri bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal. Meskipun tanggung jawab tertentu dapat didelegasikan kepada bawahan, tanggung jawab akhir tetaplah pada manajemen. Meskipun auditor internal, auditor ekstern, dan pihak-pihak lain secara langsung memperhatikan sistem pengendalian internal perusahaan, tanggung jawab utama sistem ini tetaplah pada manajemen. Jaminan yang memadai, konsep jaminan yang memadai harus dikaitkan dengan manfaat dan biaya pengendalian. Manajemen yang hati-hati tidak akan menghabiskan biaya untuk manfaat pengendalian yang lebih kecil dari biayanya.

Cukup sering pertimbangan manajemen mengenai manfaat dan biaya pengendalian relatif, bersifat subyektif secara alamiah. Seringkali sulit untuk mengukur manfaat dan biaya jika faktor-faktor seperti reputasi perusahaan atau dampak moral pengendalian terhadap karyawan merupakan pertimbangan utama. Manajemen harus menguji pertimbangan untuk memperoleh jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendaliannya adalah tetap terjaganya fungsi operasional perusahaan.

Fungsi operasional perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi empat bagian utama, yaitu meliputi pemasaran, produksi, keuangan dan personalia. Sedangkan masing-masing penjelasan fungsi operasional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang mana perorangan atau kelompok memperoleh yang mereka butuhkan dan inginkan melalui perbuatan dan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain. Pada suatu perusahaan bagian pemasaran biasanya merupakan kegiatan yang melakukan penjualan barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
- b. Produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Dari uraian di atas maka dapatlah kita menarik kesimpulan mengenai pengertian proses produksi. Proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode dan teknik untuk

menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan dan dana) yang ada.

- c. Keuangan, merupakan bagian yang menangani masalah keluar masuknya uang ke perusahaan.
- d. Personalia, merupakan suatu bagian yang membawahi atau mengurus para karyawan atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka melakukan proses produksi.

5. Kas

a. Pengertian Kas

Menurut Surya (2012:66) kas adalah media pertukaran standar serta merupakan dasar akuntansi dan pengukuran untuk semua pos-pos lainnya. Menurut Soemarso (2009:296) bahwa kas adalah segala bentuk (baik yang berbentuk atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Menurut Zaki Baridwan (2004) Kas adalah aset yang tidak produktif sehingga harus dijaga supaya jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terjadi “idle cash”. Meskipun daya beli uang bisa berubah-ubah tetapi perubahan daya beli tersebut tidak mengakibatkan penilaian kembali terhadap kas.

b. Komposisi Kas

Menurut Zaki Baridwan (2004) yang termasuk kas adalah alat pertukaran yang dapat diterima sebagai pelunasan hutang dan sebagai suatu setoran bank dengan sebesar nominal serta simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, uang yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk giro atau *bilyet*, *traveler's check*, *cashier check*, *bank draft*, dan *money order*. Surat-surat berharga seperti saham dan obligasi mungkin dapat segera dijual menjadi uang tunai, tetapi sebelum dijualnya surat-surat berharga tersebut maka tidak termasuk dalam kelompok kas melainkan investasi jangka pendek. Simpanan dalam bank yang berada di luar negeri

akan menimbulkan masalah tersendiri karena mata uang yang berbeda. Untuk itu simpanan tersebut harus dikurskan dalam rupiah terlebih dahulu.

Simpanan-simpanan tersebut biasanya tidak dapat diambil sewaktu-waktu yang kemudian dalam neraca simpanan akan dilaporkan secara terpisah. Uang kas yang terbatas dalam penggunaannya, biasanya terdapat dalam bentuk dana yang tidak dimasukkan dalam kas tetapi dilaporkan secara terpisah sebagai dana. Jika penggunaannya masih dalam waktu satu tahun maka termasuk dalam kelompok aset lancar, tetapi jika tidak dapat digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran dalam waktu satu tahun maka termasuk dalam kelompok aset tidak lancar.

Adapun kas kecil dan kas yang berada di cabang-cabang tetap termasuk dalam kas karena telah memenuhi batasan-batasan seperti tersebut diatas. Cek-cek yang sudah ditulis tapi belum diserahkan kepada orang yang dibayar tidak dikeluarkan dari kas. Apabila pada waktu menulis cek sudah dikreditkan dalam rekening kas, maka pada akhir periode jika cek tersebut belum juga diserahkan akan dibuat jurnal untuk mendebit kembali rekening kas.

c. Pengawasan Kas

Kas memiliki sifat sangat mudah dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan sehingga mudah terjadi penggelapan. Oleh karena ini perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kas. Pada umumnya suatu pengawasan internal terhadap kas akan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Tanpa adanya pemisahan fungsi tersebut, maka kas akan mudah digelapkan. Bentuk dan jenis perusahaan ada bermacam-macam, maka sistem pengawasan internal dalam suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan yang lain. Meskipun demikian, ada dasar-dasar tertentu yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan pengawasan terhadap kas sebagai berikut:

a. Penerimaan uang

Penerimaan uang dalam suatu perusahaan bisa berasal dari beberapa sumber, seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, dan pinjaman. Maka prosedur pengawasan yang dapat digunakan yaitu:

1. Harus ditunjukkan dengan jelas mengenai fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan kemudian disetor ke bank.
2. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dan fungsi pencatatan kas.
3. Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Setiap hari harus dibuat laporan kasnya.

b. Pengeluaran kas

Pengeluaran uang yang terjadi dalam sebuah perusahaan adalah untuk pembayaran bermacam-macam transaksi. Apabila pengawasan tidak dijalankan dengan ketat, maka sering kali terjadi jumlah pengeluaran yang diperbesar dan selisihnya kemudian digelapkan. Beberapa prosedur pengawasan yang penting adalah sebagai berikut:

1. Semua pengeluaran uang menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang dibayar dari kas kecil.
2. Dibentuk kas kecil yang penggunaannya diawasi dengan ketat.
3. Penulisan cek hanya dapat dilakukan jika didukung dengan bukti-bukti atau dokumen yang lengkap.
4. Diadakan pemisahan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran kas.
5. Diadakan pemeriksaan internal dengan jangka waktu yang tidak tentu.
6. Diharuskan membuat laporan kas harian.

Dengan adanya prinsip-prinsip pengawasan internal terhadap kas tersebut akan timbul beberapa masalah yaitu mengenai pembentukan kas kecil dan karena adanya rekening giro bank, maka setiap periode perlu diadakan rekonsiliasi antara saldo kas dengan saldo menurut laporan bank.

d. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Menurut Mulyadi (2013) Sistem penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melakukan kegiatan penerimaan kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun yang berupa surat-surat berharga yang sifatnya dapat segera digunakan yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan, sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi penjualan tunai. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang.

e. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Menurut James A Hall (2011) sistem akuntansi pengeluaran kas adalah memproses pembayaran kewajiban yang dihasilkan oleh sistem pembelian. Menurut Mulyadi (2013) sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya karena dalam jumlah yang relatif kecil.

f. Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas

Sistem pengendalian internal penerimaan kas menekankan pada tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Pengendalian internal berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer. Untuk sistem pengendalian internal penerimaan kas, catatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penerimaan kas baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang sifatnya dapat

segera digunakan dari perusahaan maupun dari penjualan tunai. Sedangkan sistem pengendalian internal pengeluaran kas catatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan baik dengan cek maupun uang tunai melalui sistem dana kas kecil.

